



Sistem Informasi Modul Registrasi Npwpd Berbasis Laravel pada BPPKAD Kota Kediri

Deyafa Arsetya¹, Novita Dewi Susanti², Riswanda Al Farisi^{3*}

¹⁻³ Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Malang di Kediri, Indonesia

*Penulis Korespondensi: riswanda.al@polinema.ac.id

Abstract: *The Information System registration module for the Regional Taxpayer Identification Number (NPWPD) was developed using the Laravel framework and implemented by the Taxpayer Identification Agency (BPPKAD) at Kediri City. The system was designed to digitize the NPWPD registration process, which was previously done manually. This traditional approach often led to long queues, extended processing times, and, at times, errors in data entry. The new system offers several key advantages, including an online registration form that allows taxpayers to upload required documents such as photos of ID cards, business locations, and other necessary paperwork. Data validation is performed by officers to ensure accuracy, and automatic notifications are sent to taxpayers, informing them of the status of their applications. The implementation of this system has had several positive impacts, such as significantly improving the efficiency of administrative processes, reducing the manual workload for officers, and increasing transparency and accountability in public services. Moreover, it has improved customer satisfaction by providing faster, more accurate, and more responsive services. This system supports the creation of a streamlined, user-friendly, and effective method for taxpayers to register for NPWPD online, enhancing the overall quality of public sector service delivery.*

Keywords : Framework Laravel; NPWPD; Public Service; System; Transparency.

Abstrak: Modul Sistem Informasi Registrasi Nomor Identifikasi Wajib Pajak Daerah (NPWP) dikembangkan menggunakan framework Laravel dan diimplementasikan oleh Badan Identifikasi Wajib Pajak (BPPKAD) di Kota Kediri. Sistem ini dirancang untuk mendigitalisasi proses registrasi NPWP, yang sebelumnya dilakukan secara manual. Pendekatan tradisional ini seringkali menyebabkan antrian panjang, waktu pemrosesan yang lama, dan terkadang kesalahan dalam penginputan data. Sistem baru ini menawarkan beberapa keunggulan utama, termasuk formulir registrasi online yang memungkinkan wajib pajak untuk mengunggah dokumen yang dibutuhkan seperti foto KTP, lokasi usaha, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Validasi data dilakukan oleh petugas untuk memastikan keakuratan, dan pemberitahuan otomatis dikirimkan kepada wajib pajak, yang memberitahukan status permohonan mereka. Implementasi sistem ini telah memberikan beberapa dampak positif, seperti peningkatan efisiensi proses administrasi secara signifikan, pengurangan beban kerja manual bagi petugas, dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Selain itu, sistem ini juga meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan layanan yang lebih cepat, lebih akurat, dan lebih responsif. Sistem ini mendukung terciptanya metode yang efisien, ramah pengguna, dan efektif bagi wajib pajak untuk mendaftarkan NPWPD secara daring, sehingga meningkatkan kualitas keseluruhan penyampaian layanan sektor publik.

Kata Kunci : Framework Laravel; NPWPD; Pelayanan Publik; Sistem; Transparansi.

1. LATAR BELAKANG

Pesatnya perkembangan teknologi Informasi pada saat ini mengharuskan pemerintah beradaptasi dalam hal pengelolaan dalam sektor publik, karena perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi dapat memberikan kontribusi, dan kemudahan pekerjaan pemerintahan daerah agar bisa berjalan lebih efektif dan Efisien ((Muttaqin et al., 2023). Penerapan teknologi yang baik di bidang pemerintah tentu saja dapat mendukung proses pengelolaan keuangan daerah dengan lebih efisien, transparan , akuntabel dan editable.

Dalam rangka melakukan Pengelolaan Keuangan Daerah secara transparan dan akuntabel, pemerintah sebaiknya memanfaatkan perkembangan teknologi yang saat ini berkembang sangat pesat, teknologi dalam bidang keuangan tersebut salah satunya adalah

dalam melakukan registrasi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebelumnya masih dilakukan secara manual, maka dengan adanya sistem ini masyarakat dapat melakukan registrasi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) lebih cepat dan tepat. Sistem informasi modul registrasi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ini dikembangkan berbasis web menggunakan framework Laravel dan diterapkan pada BPPKAD Kota Kediri. Pengembangan sistem ini bertujuan untuk mendigitalisasi proses pendaftaran NPWPD yang sebelumnya dilakukan secara manual, sehingga sering menimbulkan antrean, membutuhkan waktu lama, dan rawan kesalahan input data. Saat ini dapat dilakukan secara online sehingga lebih cepat dan efisien

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri, khususnya di bagian Teknologi Informasi. BPPKAD memiliki peran strategis dalam mendukung pendapatan daerah, salah satunya melalui layanan administrasi perpajakan daerah. Namun, proses registrasi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebelumnya masih dilakukan secara manual, sehingga kurang efisien, memerlukan waktu yang lama, serta rawan terjadi kesalahan pencatatan. Kondisi ini tentu berdampak pada efektivitas pelayanan publik dan transparansi administrasi pajak daerah.

Tujuan Penelitian:

- a. Sistem informasi yang mampu membantu masyarakat dalam melakukan registrasi NPWPD memberikan dampak positif berupa peningkatan efisiensi proses administrasi, pengurangan beban kerja manual petugas, dan peningkatan transparansi pelayanan publik
- b. Sistem ini dapat mendukung terciptanya pelayanan yang cepat, akurat, dan responsif bagi masyarakat yang ingin melakukan registrasi NPWPD secara daring
- c. Dalam registrasi yang dapat dilakukan secara daring pengurangan beban kerja manual petugas, dan peningkatan transparansi pelayanan publik

2. KAJIAN TEORITIS

Sebelum melakukan perancangan dan pembangunan sistem, peneliti melakukan tinjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tema, objek, maupun metode dengan penelitian yang sedang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui posisi penelitian, menghindari duplikasi, serta menemukan kebaruan (novelty) dari sistem yang akan dibangun.

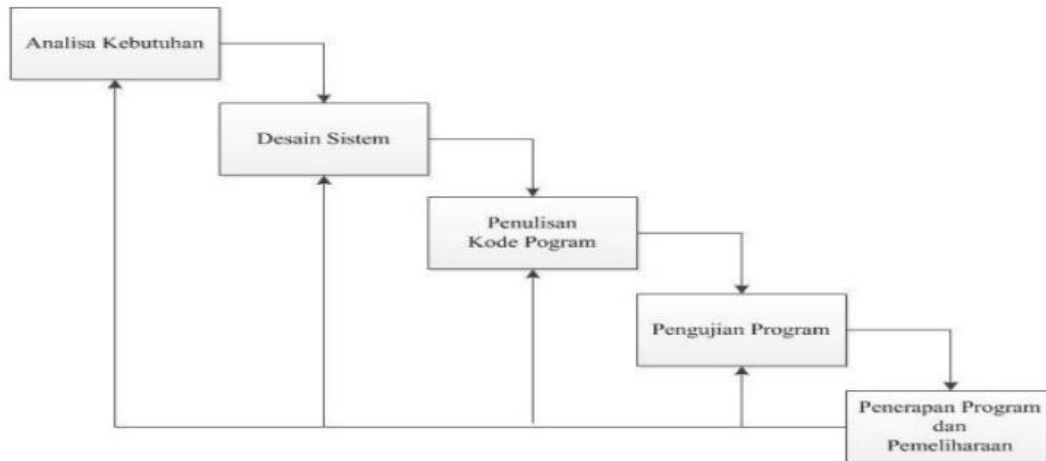
- a. Penelitian pertama dilakukan oleh Maulidatul dan Djasuli (2025) dengan judul " Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang”. Penelitian ini berfokus pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk melakukan berbagai kegiatan yang menjadi program dari pemerintah Kabupaten Sampang. Berdasarkan informasi yang didapatkan Sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) berfungsi untuk memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah sama-sama menggunakan platform berbasis web dan berfokus pada Sistem BPPKAD. Namun, perbedaannya terletak pada cakupan fitur, di mana penelitian Maulidatul dan Djasuli lebih berfokus pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah sedangkan penelitian ini menekankan pada aspek registrasi atau pendaftaran NPWPD agar lebih efisien dan bisa dilakukan secara real-time.

- b. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Aisyah dan Yessi(2024) dengan judul “Analisis Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang “. Penelitian ini berfokus pada Sistem pemungutan pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bapenda Kota Padang dimulai dari melakukan registrasi dan memilih jenis pajak, di kota Padang. Sedangkan di Kota Kediri belum ada registrasi secara online, oleh sebab itu peneliti disini ingin membuat registrasi NPWPD di Kota Kediri agar bisa dibuat secara online. Agar ketika ada kekurangan syarat dan lain sebagainya bisa lebih cepat, efisien dan tidak menyulitkan bagi pendaftar pajak daerah.

3. METODE PENELITIAN

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Waterfall. Metode Waterfall merupakan model pengembangan sistem yang dilakukan secara berurutan dan sistematis (Ardiansah & Hidayatullah, 2023), di mana setiap tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.



Gambar 1 Metode Pengembangan Sistem.

a. Analisis Kebutuhan (Requirement Analysis)

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan analisis kebutuhan sistem berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

b. Perancangan Sistem (System Design)

Tahap perancangan sistem dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Pada tahap ini dirancang struktur sistem secara keseluruhan, meliputi use case diagram, activity diagram, perancangan basis data dan relasi antar tabel, arsitektur sistem, serta rancangan antarmuka pengguna (user interface).

c. Implementasi (Coding)

Pada tahap implementasi, hasil perancangan sistem diterjemahkan ke dalam bentuk kode program menggunakan teknologi berbasis web.

d. Pengujian Sistem (Testing)

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Pengujian dilakukan menggunakan metode black box testing dengan cara menguji setiap fungsi berdasarkan input dan output yang dihasilkan.

e. Pemeliharaan (Maintenance)

Tahap pemeliharaan dilakukan setelah sistem diimplementasikan dan digunakan. Pemeliharaan bertujuan untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin muncul, meningkatkan kinerja sistem, serta melakukan penyesuaian minor sesuai dengan kebutuhan pengguna.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini akan dibahas secara detail hasil dari penyelenggaraan kegiatan berdasarkan metode pelaksanaan yang telah disusun sebelumnya.

Analisis Sistem

a. Analisis Permasalahan

Dalam proses registrasi NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) pada BPPKAD Kota Kediri, masih terdapat kendala dalam hal efisiensi dan transparansi. Sebelum adanya sistem informasi, proses registrasi dilakukan secara manual dengan pengumpulan dokumen fisik dan verifikasi tatap muka, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama serta rawan terjadi kesalahan administrasi. Selain itu, wajib pajak kesulitan untuk mengetahui status pendaftaran secara cepat karena harus menunggu informasi langsung dari petugas. Dari sisi petugas, verifikasi data juga tidak efisien karena dokumen harus diperiksa satu per satu secara manual.

b. Analisis Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkan sistem informasi berbasis web menggunakan framework Laravel. Sistem ini memungkinkan:

- Pendaftaran online oleh wajib pajak dengan mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan.
- Otomatisasi bukti pendaftaran, di mana sistem langsung menghasilkan bukti registrasi yang dapat dicetak pengguna, serta mengirim notifikasi melalui email.
- Monitoring status pendaftaran, sehingga wajib pajak dapat mengecek apakah statusnya masih pending, approved, atau rejected.
- Verifikasi digital oleh admin, sehingga petugas dapat lebih cepat memeriksa data yang masuk dan menentukan keputusan (disetujui atau ditolak).
- Alasan penolakan transparan, karena jika ditolak, sistem akan menampilkan pop up berisi alasan penolakan agar wajib pajak dapat melakukan perbaikan data.

Dengan solusi ini, proses registrasi menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien, baik bagi wajib pajak maupun petugas BPPKAD.

Perancangan Sistem Informasi Modul Registrasi NPWPD

a. *Diagram Use Case*

Use case sistem ini melibatkan dua aktor utama: User (Wajib Pajak) dan Admin (Petugas BPPKAD).

- 1) User (Wajib Pajak) dapat melakukan:
 - Registrasi NPWPD (termasuk upload dokumen KTP dan foto lokasi usaha).
 - Menerima email notifikasi (setelah registrasi berhasil).
 - Mendapatkan bukti pendaftaran.
 - Mencetak bukti pendaftaran.
 - Mengecek status registrasi (pending/approved/rejected).
- 2) Admin (Petugas BPPKAD) dapat melakukan:
 - Login ke sistem.
 - Melihat data pendaftaran NPWPD.
 - Memverifikasi data dan dokumen.
 - Mengubah status pendaftaran menjadi approved/rejected.
 - Memberikan alasan penolakan (jika status rejected).

Perancangan use case diagram untuk Sistem Informasi Modul Registrasi NPWPD dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2 Usecase Sistem Informasi Modul Registrasi NPWPD.

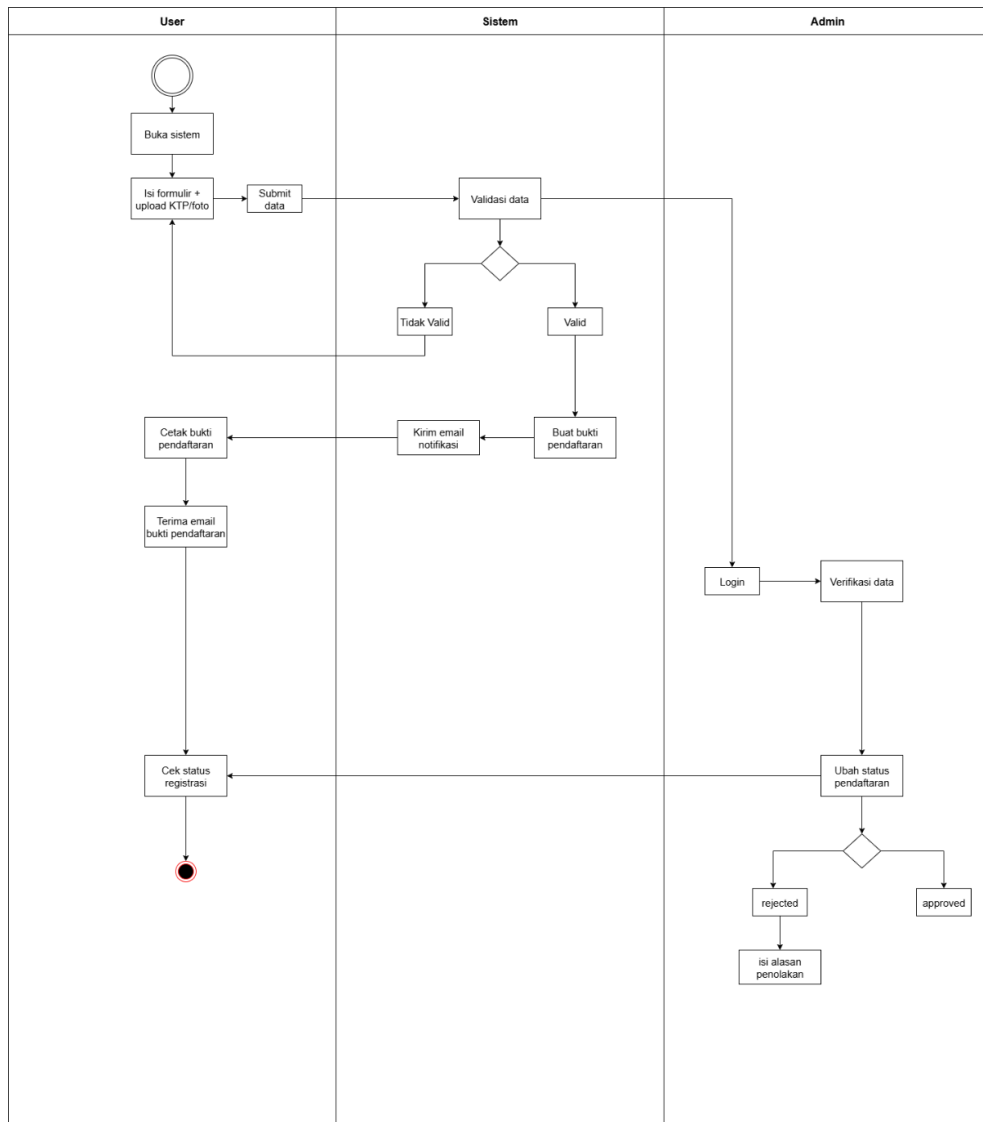
Berdasarkan Gambar 2, Use Case Diagram Sistem Informasi Registrasi NPWPD melibatkan dua aktor utama, yaitu User (Wajib Pajak) dan Admin (Petugas BPPKAD). User dapat melakukan registrasi NPWPD dengan mengunggah dokumen persyaratan, menerima email notifikasi, mendapatkan serta mencetak bukti pendaftaran, dan memantau status registrasi. Sementara itu, Admin memiliki peran dalam melakukan login, melihat data pendaftaran, memverifikasi dokumen, serta mengubah status registrasi menjadi approved atau rejected disertai alasan penolakan. Dengan adanya pembagian peran tersebut, sistem dirancang untuk memperjelas alur interaksi antara User dan Admin sehingga proses registrasi NPWPD dapat berjalan lebih terstruktur, transparan, dan efisien.

b. Diagram Activity

Berikut adalah alur utama sistem registrasi NPWPD yang digambarkan dalam diagram activity:

- 1) User membuka sistem, mengisi formulir registrasi sekaligus mengunggah dokumen KTP dan foto lokasi usaha, lalu men-submit data.
- 2) Sistem secara otomatis menyimpan data, menghasilkan bukti pendaftaran, mengirim email notifikasi kepada user, dan menyediakan file bukti pendaftaran.
- 3) User dapat mencetak bukti pendaftaran tersebut.
- 4) Admin melakukan login ke dalam dashboard admin, kemudian membuka daftar pendaftaran untuk melakukan verifikasi data dan dokumen.
- 5) Jika data valid, status registrasi berubah menjadi approved. Jika data tidak valid, status berubah menjadi rejected dengan disertai input alasan penolakan oleh Admin.

Perancangan diagram activity untuk Sistem Informasi Modul Registrasi NPWPD dapat dilihat pada Gambar 3



Gambar 3 Diagram Activity Sistem Registrasi NPWPD.

c. *Rancangan Relasi Antar Tabel*

- 1) User (data wajib pajak).
- 2) NPWPD (data pendaftaran: nama, alamat, jenis usaha, dll.).
- 3) Dokumen (menyimpan KTP & foto lokasi).
- 4) Petugas (data admin/petugas BPPKAD).
- 5) Verifikasi (status pending/approved/rejected + alasan penolakan).

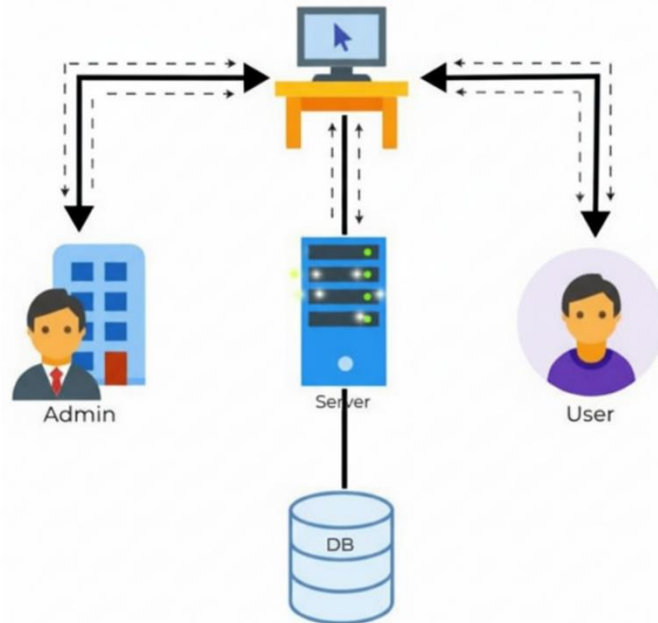
Relasi:

NPWPD → User, Dokumen terkait ke NPWPD, Verifikasi terkait ke Petugas dan NPWPD.

d. *Arsitektur Sistem*

Arsitektur sistem yang digunakan pada aplikasi ini dirancang untuk memisahkan antara antarmuka pengguna (frontend), logika bisnis (backend), dan penyimpanan data (database). Pemisahan ini bertujuan agar sistem dapat berjalan secara terstruktur, mudah dikelola, serta memudahkan proses pengembangan maupun pemeliharaan di masa mendatang.

Berikut merupakan gambaran umum arsitektur sistem yang digunakan:



Gambar 4 Arsitektur Sistem Sistem Registrasi NPWPD.

Komponen utama pada arsitektur sistem:

- 1) Client (Pengguna)
 - Mengakses sistem melalui browser.
 - Berinteraksi dengan antarmuka pengguna untuk melakukan registrasi NPWPD dan mengecek status pendaftaran.
- 2) Web Server / Backend
 - Menangani seluruh permintaan (request) dari pengguna.
 - Mengelola logika bisnis, memproses data, dan mengatur alur kerja sistem.
 - Dibangun menggunakan framework Laravel (PHP).
- 3) Database Server
 - Menyimpan seluruh data yang berkaitan dengan pendaftaran NPWPD, seperti data wajib pajak, dokumen, dan status pendaftaran.
 - Menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen basis data.

4) Administrator

- Mengelola data melalui antarmuka admin.
- Mempunyai akses untuk memverifikasi dan mengubah status pendaftaran NPWPD.

Alur Proses Sistem:

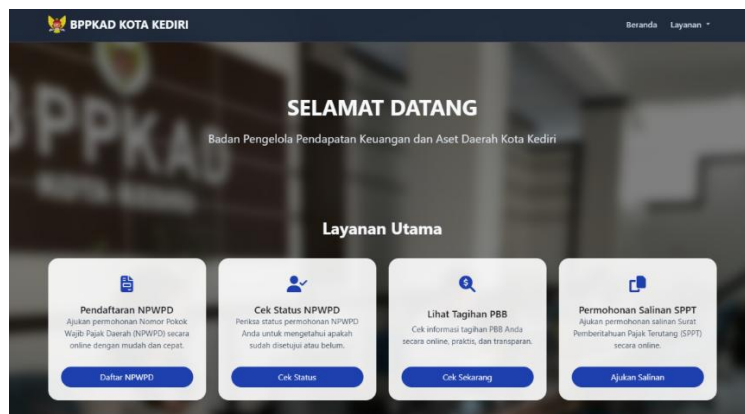
- 1) Pengguna mengisi data registrasi melalui browser.
- 2) Permintaan dikirim ke Web Server yang memproses data menggunakan Laravel.
- 3) Data disimpan ke Database Server.
- 4) Admin dapat mengakses data melalui antarmuka admin untuk melakukan verifikasi.
- 5) Status verifikasi kemudian dikirim kembali dan ditampilkan ke pengguna.

e. *Rancangan Antarmuka*

Berikut merupakan rancangan antarmuka sistem pendaftaran BPPKAD Kota Kediri. Rancangan antarmuka ini dibuat untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara online dan mempermudah admin dalam melakukan proses verifikasi data.

1) Halaman Utama

Menampilkan halaman awal website yang berisi informasi singkat serta menu layanan utama seperti pendaftaran NPWPD, cek status, lihat tagihan PBB, dan permohonan salinan SPPT. Halaman ini menjadi gerbang utama sebelum pengguna mengakses layanan. Rancangan halaman ini dapat dilihat pada gambar 5



Gambar 5 Rancangan Halaman Utama.

2) Halaman Registrasi NPWPD

Berisi form input data wajib pajak seperti nama, alamat, NIK, dan data usaha, serta upload dokumen persyaratan (foto KTP, foto lokasi, dll). Terdapat validasi

agar data yang dikirim benar dan lengkap. Rancangan halaman ini dapat dilihat pada gambar 6

Gambar 6 Rancangan Halaman Utama.

Gambar 7 Rancangan Halaman Registrasi NPWPD.

3) Halaman Bukti Pendaftaran

Menampilkan bukti pendaftaran NPWPD yang muncul secara otomatis setelah pengguna berhasil mengirim data pendaftaran. Terdapat tombol Cetak Bukti Pendaftaran untuk mencetak bukti tersebut dalam bentuk PDF. Rancangan halaman ini dapat dilihat pada gambar 8

Pendaftaran Berhasil

Terima kasih telah mendaftar NPWPD. Pendaftaran Anda telah berhasil disubmit.

Nomor Registrasi: REG-202509-0001

Nama Outlet	: LAUE BURGER
Jenis Pajak	: Pajak Restoran
Rincian Pajak	: Restoran A
Nama Pemilik	: FAIZ
NIK Pemilik	: 2638463526192736
Tanggal Pendaftaran	: 16/09/2025 21:29

- Pendaftaran Anda sedang dalam proses verifikasi
- Data Anda akan dicek, dan jika lolos verifikasi, informasi selanjutnya akan dikirim melalui email atau WhatsApp
- Jika diperlukan, petugas akan menghubungi Anda untuk memastikan data yang dikirim sudah benar

[Beranda](#)
[Print Bukti](#)

Gambar 8 Rancangan Halaman Bukti Pendaftaran.

4) Halaman Cek Status Registrasi

Menampilkan status pendaftaran NPWPD yang telah diajukan pengguna. Setiap data menampilkan status: Pending / Approved / Rejected, beserta alasan penolakan jika ditolak. Rancangan halaman ini dapat dilihat pada gambar 9

Cek Status NPWPD

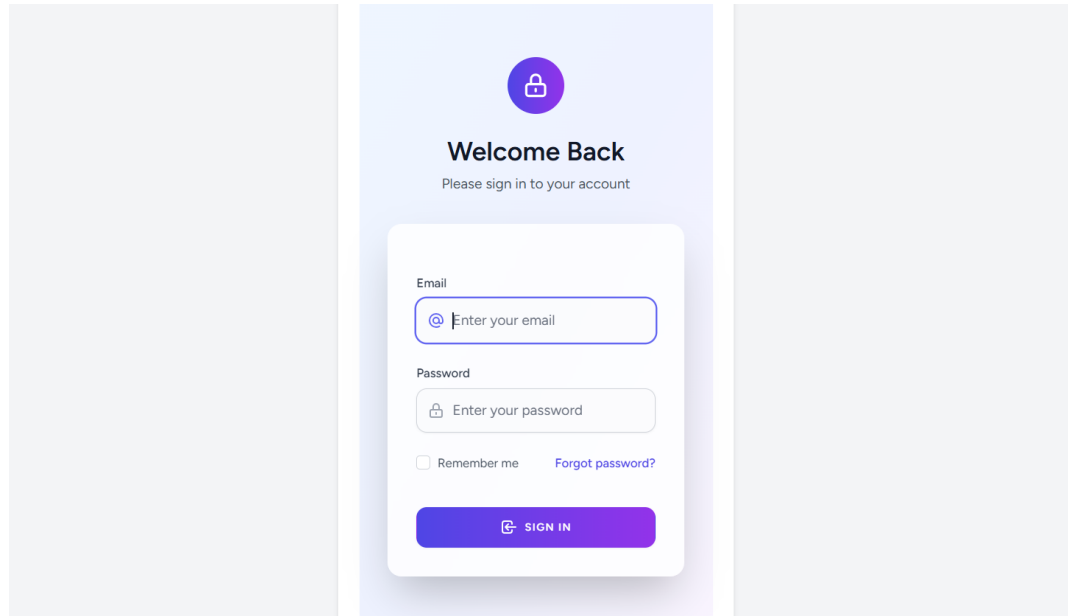
Silakan masukkan Nomor Registrasi NPWPD Anda pada kolom di bawah ini untuk melihat pembaruan status permohonan Anda. Pastikan nomor yang dimasukkan sudah benar.

Nomor Registrasi NPWPD:
 Contoh: REG-xxxxxx-xxxx
[Periksa Status](#)

Gambar 9 Rancangan Halaman Cek Status Registrasi.

5) Halaman Login Admin

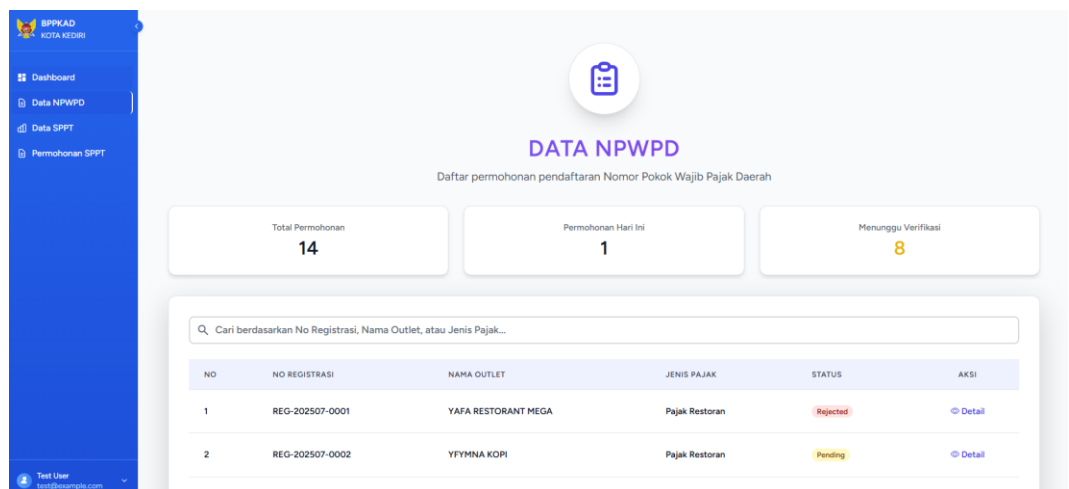
Digunakan oleh admin untuk masuk ke sistem dengan menggunakan akun yang telah terdaftar. Admin tidak dapat mengakses dashboard tanpa login terlebih dahulu. Rancangan halaman ini dapat dilihat pada gambar 10



Gambar 10 Rancangan Halaman Login Admin.

6) Dashboard Admin

Berisi daftar seluruh pendaftar NPWPD. Admin dapat melihat detail data pendaftar, mengunduh dokumen persyaratan, dan memverifikasi status pendaftaran menjadi Approved / Rejected disertai alasan penolakan jika ditolak. Rancangan halaman ini dapat dilihat pada gambar 4.10



Gambar 11 Rancangan Dashboard Admin.

5) KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sistem Registrasi NPWPD yang dikembangkan telah berhasil memenuhi tujuan utama, yaitu mempermudah proses pendaftaran NPWPD secara daring bagi wajib pajak di BPPKAD Kota Kediri. Sistem mampu mengelola data pendaftaran dengan baik, mulai dari proses registrasi, verifikasi oleh admin, hingga pencetakan bukti pendaftaran. Pengujian sistem menunjukkan bahwa seluruh fitur utama berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Dengan adanya sistem ini, efisiensi waktu dan keakuratan pengelolaan data pendaftaran NPWPD menjadi lebih meningkat dibandingkan dengan proses manual sebelumnya.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut. Perlu dilakukan pemeliharaan sistem secara berkala untuk memastikan sistem tetap berjalan optimal dan terhindar dari kesalahan (error/bug). Perlu dilakukan pengembangan fitur lanjutan, seperti notifikasi otomatis kepada wajib pajak dan laporan statistik pendaftaran untuk admin. Diperlukan pelatihan atau sosialisasi kepada petugas dan wajib pajak agar dapat menggunakan sistem ini secara maksimal. Diharapkan ke depannya sistem ini dapat diintegrasikan dengan layanan lain yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmadi, E. A. (2020). Analisis trend penerimaan dan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Bojonegoro tahun 2016–2020 (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 8(2). <https://sultanist.ac.id/index.php/sultanist/article/view/202>. Diakses pada 22 Februari 2023
- Aisyah, & Yessi Rinanda. (2024). Analisis pelaksanaan sistem pemungutan pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. *Jurnal Riset Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 1(3), 121–131. <https://doi.org/10.62194/nqpfv632>
- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Amirah, T., Muttaqin, I., Arridho Nuramin, M., Murdiati, S., Sulistiani, T., Herwinarni, Y., Rani Amalia, M., Noviany Rahmatika, D., & Masuk Naskah Direvisi Naskah Diterima Mei, N. (n.d.). Pelaksanaan pendataan wajib pajak daerah Kabupaten. <https://ejournal.catuspata.com/index.php/joswae>
- Anggreni, N. L. P. I., & Sari, M. M. R. (2020). Analisis potensi dan efektivitas pemungutan pajak restoran terhadap realisasi penerimaan pajak restoran di Kecamatan Kuta Selatan. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(3).

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/55016>. Diakses pada 8 Juli 2023

- Balqis, N., & Fadhly, Z. (2021). Efektivitas penerapan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distranaker) Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Public Policy*, 7(2), 117–121.
- Estiningsih, W., & Nurranto, H. (2019). Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah. *Journal of Applied Business and Economics (JABE)*, 6(2). <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/JABE/article/view/4932>. Diakses pada 17 Mei 2023
- Hamzani, H., Arifin, M. A., & Putra, P. S. (2021). Analisis sistem dan prosedur penerimaan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 3(2), 171–181. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/mediasi/article/view/5490>. Diakses pada 1 Mei 2023
- Hasanah, U., Nirmala, D., Faradina, M. P., Aisyah, S., Hartatik, S. S., & Abrori, R. (2023). Pemberdayaan peran mahasiswa dalam upaya meningkatkan kinerja BPPKAD Kabupaten Sumenep pada program MKBM Magang Industri. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(3).
- Hatta, N. D. H. R. (2009). Program studi Ilmu Komputer Universitas Mulawarman perancangan sistem informasi terpadu pemerintah daerah Kabupaten Paser.
- Laoli, M. I., Ndraha, A. B., & Telaumbanua, Y. (2022). Implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Nias (Studi kasus BPKPD sebagai leading sektor penganggaran). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 10(4), 1381–1389.
- Manoe, D. S., Koten, Y. P., & Rozady, M. P. (2023). Analisis efektivitas penerapan aplikasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) bidang anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sikka. *Increate-Inovasi dan Kreasi dalam Teknologi Informasi*, 9(1).
- Maulidatul Hasanah, P., Djasuli, M., Studi Akuntansi, P., & Ekonomi dan Bisnis, F. (n.d.). Analisis penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Mei, 2025(C), 156–164.
- Muttaqin, I., Adiranti, U., & Zakiyah, R. D. (2023). Analisis penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada bidang perbendaharaan dan kas daerah BPPKAD Kota Probolinggo. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi (JABE)*, 9(1), 2310–2318.
- Nasution, M. I., & Si, N. M. (2021). Analisis penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 109–116.
- Pasulu, M., Hasliah, H., & Pragemini, P. (2022). Pengaruh penerapan sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan (SIMRAL) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jenepono. *AkMen JURNAL ILMIAH*, 19(1), 78–90.
- Sembor, N. J. G., Gamaliel, H., Nehemiah, O., Sembor, J. G., Gamaliel, H., Mawikere, L. M., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2023). Pendapatan daerah Kota Manado system analysis and procedures for receiving restaurant taxes at the Manado city regional revenue agency. *Mawikere*, 599 *Jurnal EMBA*, 11(3), 599–608.

- Ulfa Adiranti, & Mohamad Djasuli. (2024). Analisis penerapan dan pengembangan aplikasi SIMKASDA (Sistem Informasi Manajemen Kas Daerah) dalam meningkatkan efisiensi keberhasilan dan pelaporan keuangan: Studi kasus BPPKAD Kota Probolinggo. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.2502>
- Yanto, E., Sahwan, S., & Prathomo, J. (2023). Implementation of regional government information systems in the regional financial management study at the Tolitoli regency environmental service. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1647–1653.